

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Muhammad Hafiz

NPP. 29.0278

Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Program Studi Kebijakan Publik

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: hafizmuhammad2906@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): This thesis has the title "IMPLEMENTATION OF CASH DIRECT ASSISTANCE PROGRAM IN TENAYAN RAYA DISTRICT, PEKANBARU CITY, RIAU PROVINCE". **Purpose:** This study aims to find out why the implementation of the direct cash transfer program in Tenayan Raya District, Pekanbaru City was not right on target, and to find out the efforts made so that the implementation of the direct cash transfer program in Tenayan Raya District, Pekanbaru City was not on target.

Method : This research was conducted using a descriptive qualitative method that describes the implementation of the Direct Cash Assistance Program in Tenayan Raya District, Pekanbaru City. Data was collected using observation, interviews and documentation. The author in collecting data using the method owned by Edward III. In this study, the authors limit the author's research, namely on the implementation of Direct Cash Assistance in Tenayan Raya District, Pekanbaru City related to the process of distributing information and socialization carried out. **Result:** From the results of the research conducted, it can be concluded that the Implementation of the Direct Cash Assistance Program in Tenayan Raya Pekanbaru District is still not going well. This is based on the 4 dimensions used to measure the running of the Cash Direct Assistance Program in Tenayan Raya District, Pekanbaru City including, Communication, Resources, Disposition, and Organizational Structure. The author suggests that the Pekanbaru City government hold intensive meetings by adding the duration of the meeting in each month and increasing the quality and quantity of human resources that are directly related to direct cash assistance, so that program implementation can run well and on target. **Conclusion/sugestion:** The implementation of the Direct Cash Assistance Program in Tenayan Raya District, Pekanbaru City, Riau Province is still not on target this is due to a lack of communication between related parties which will lead to unclear information conveyed to the public, this will cause people to lack understanding about the Direct Assistance program Cash.

Keywords: *Implementation, Program, BLT*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Skripsi yang disusun ini berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU”. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa implementasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tidak tepat sasaran, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan agar implementasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tidak tepat sasaran. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Pengumpulan Data dilakukan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan metode yang dimiliki oleh Edward III. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian penulis yaitu pada pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terkait proses penyaluran informasi dan sosialisasi yang dilakukan. **Hasil/Temuan:** Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan 4 dimensi yang digunakan untuk mengukur berjalannya Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru diantaranya, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi. Penulis menyarankan agar pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan pertemuan secara intensif dengan menambahkan durasi pertemuan di setiap bulannya dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan bantuan langsung tunai, agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. **Kesimpulan dan Saran:** Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau masih banyak yang tidak tepat sasaran hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antar pihak terkait yang akan menimbulkan informasi yang kurang jelas tersampaikan kepada masyarakat, hal ini akan menyebabkan masyarakat kurang memahami mengenai program Bantuan Langsung Tunai. **Kata Kunci:** Implementasi, Program, BLT

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, termasuk masalah kemiskinan. Permasalahan tersebut timbul akibat ketidakmerataannya hasil pendapatan masyarakat yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia ini seperti tidak ada habisnya. Tujuan nasional dari Negara Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meningkatkan kinerja ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk mengurangi garis kemiskinan yang ada.

Jika mencermati tujuan nasional tersebut sesungguhnya dijiwai oleh sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kelima dan kedua yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam sila kelima Pancasila terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu tujuan negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum adalah dengan menekan angka kemiskinan dan membantu kesejahteraan masyarakat miskin yang ada. Kemiskinan adalah suatu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk miskin adalah mereka yang jatuh di bawah standar atau disebut sebagai garis kemiskinan. Masyarakat dikatakan miskin apabila masyarakat tersebut memiliki pendapatan yang tidak mampu dalam memikul tanggungan pokoknya, seperti makanan, pakaian dan rumah. Indonesia merupakan negara yang memiliki angka kemiskinan yang termasuk tinggi, banyak hal yang menjadi faktor kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan memang menjadi pokok masalah dan sangat disorot yang akan menjadi topik panas pembicaraan setiap harinya dan merupakan permasalahan mendasar yang menjadi sorot tajam bagi pemerintah. Selain itu, Indonesia masih memiliki masalah pengentasan kemiskinan yang cukup sulit. Banyak faktor penyebab timbulnya kemiskinan diantaranya tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya maka dapat dikatakan masyarakat itu sudah dikatakan miskin. Pendidikan yang rendah. BLT diperkenalkan secara langsung kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005 sebagai upaya menanggulangi kenaikan harga bagi golongan masyarakat miskin. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla selang dirinya terpilih menjadi wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya berdasarkan instruksi presiden nomor 12, digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu pada tahun 2008 harga minyak dunia kembali menaik pemerintah pun kembali menyelenggarakan BLT sesuai dengan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Cash transfers atau yang dikenal dengan bantuan langsung tunai adalah salah satu program bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin melalui berbagai macam bantuan, baik bersyarat maupun tanpa syarat. Besaran dana yang disalurkan pada program BLT ini berbeda. BLT diperkenalkan secara langsung kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005 sebagai upaya menanggulangi kenaikan harga bagi golongan masyarakat miskin. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla selang dirinya terpilih menjadi wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya berdasarkan instruksi presiden nomor 12, digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu pada tahun 2008 harga minyak dunia kembali menaik pemerintah pun kembali menyelenggarakan BLT sesuai dengan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Cash transfers atau yang dikenal dengan bantuan langsung tunai adalah salah satu program bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin melalui berbagai macam bantuan, baik bersyarat maupun tanpa syarat. Besaran dana yang disalurkan pada program BLT ini berbeda-beda dalam berbagai negara tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut. Indonesia juga salah satu dari negara di dunia yang ikut menyelenggarakan BLT, pembagian BLT di Indonesia beragam mulai dari

kompensasi uang ,makanan,pelayanan kesehatan,dan edukasi. BLT dibuat sebagai wujud peka terhadap kenaikan bahan bakar minyak, dengan target utama dari program ini adalah memberi pertolongan kepada masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

fokus diberlakukannya program BLT di Kecamatan Tenayan Raya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019. BLT di Kecamatan Tenayan Raya berasal dari APBD Provinsi Riau, pendataan BLT di Kecamatan Tenayan Raya diserahkan ke Kelurahan masing-masing yang didata dan diorganisir oleh masing-masing ketua RW setempat dan pendistribusiannya dilakukan di Kantor Pos. Dalam pemberian BLT selalu terdapat permasalahan, penulis sudah melakukan kunjungan pra penelitian dan mendapat informasi awal melalui wawancara singkat dengan Staff Tantrib di Kecamatan Tenayan Raya yang mengatakan bahwa permasalahan dalam program BLT ini adalah sering tidak tepat sasaran, penyaluran BLT tersebut, hal ini dikarenakan data-data yang belum diperbaharui mengenai penerima BLT ini. Pernyataan ini diperkuat oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau masalah yang ada dalam pembagian BLT adalah tidak tepat sasaran,data yang ada belum di perbaharui dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama yaitu Cici Rianci, 2020. Judul Penelitian mplementasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-dana desa) menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang priorritas penggunaan dana desa tahun 2020 (studi kasus di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis). Metode Penelitian yang digunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum.Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum.Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian yang kedua yaitu dari athul Khairiyah, dkk,2020. Judul penelitiannya Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian nya di dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial desa Gedongarum tersebutmasih terdapat permasalahan, seperti adanya masyarakat yang tidak mendapatkan BST/BLT-Dana Desa,hal ini disebabkan karena kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sebab tidak ada pembaharuan data. Selanjutnya penelitian yang ketiga adalah Leny Diah Astari, 2021. Judul penelitian nya adalah Efektifitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Sebagai Jaminan Perlindungan Sosial di Era Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan metode

pendekatan campuran yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitiannya Penelitian ini menggunakan metode pendekatan campuran yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menurut Sugiyono (2007) metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural), dan peneliti menjadi instrument kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti, dari pada menggeneralisasikan obyek penelitian. Menurut Moleong (2002:5) “metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan.” Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln (2009), “kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.” Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Creswell (1998), menyatakan “penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.” Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Tanayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tida Tepat Sasaran.

Implementasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Tanayan Raya Kota Pekanbaru dilakukan melalui koordinasi dengan kelurahan beserta RT/RW, selanjutnya nama yang sudah didata di kecamatan akan diteruskan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dalam implementasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Tanayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau masih terdapat berbagai macam hambatan, yaitu sering tidak tepat sasarannya bantuan langsung tunai tersebut diberikan kepada masyarakat yang disebabkan berbagai macam masalah seperti tidak adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang saling bertanggung jawab mengenai penyaluran dana bantuan langsung tunai ini, data-data yang diterima setiap tahunnya tidak ada pembaharuan maupun terdapatnya data-data ganda serta tidak lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan sebuah bentuk penerapan dari suatu putusan yang diambil secara konkrit. Implementasi disini dimaksudkan untuk mengkaji sekaligus memahami penerapan BLT di Kecamatan Tanayan Raya berdasarkan pada dimensi yang telah ditentukan dalam hal ini penulis menggunakan teori dari Edward III.

1. Komunikasi

Menurut Widodo (2011:97) “komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.” Sehingga pelaksana dapat memahami apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi BLT di Kecamatan Tanayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat kebijakan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dan penerima kebijakan memahami kebijakan yang akan dilaksanakan. Pengetahuan dari setiap pihak dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik pula. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait. Dukungan dan perhatian pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga kelurahan terhadap kelancaran dalam rangkaian pemberian bantuan langsung tunai untuk masyarakat di Kecamatan Tanayan Raya Kota Pekanbaru. Dengan adanya dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah, maka segala rangkaian kegiatan dalam pemberian bantuan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi modal utama keberhasilan dari kegiatan ini. Dapat kita lihat dari keterlibatan pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi sebagai penyedia anggaran hingga kepada tingkat kelurahan yang berperan dalam mendata dan mengajukan data keluarga penerima manfaat yang berhak menerima bantuan ini.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan membutuhkan tersedianya sumberdaya yang berkualitas

atau kompeten sesuai tujuan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, infrastruktur maupun faktor penunjang lainnya. Agustino (2006:158) Edward III mengatakan “bahwa sumber daya merupakan suatu yang penting dalam implementasi kebijakan.” Pemanfaatan sumber daya yang tersedia merupakan faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan proses implementasi program. Dapat dikatakan bahwa sumber daya utama dalam implementasi program adalah sumber daya manusia sehingga jelas bahwa hal ini ditujukan pada pihak pelaksana atau implementator yang mencukupi, memadai ataupun yang kompeten di bidangnya. Namun, pada awal pelaksanaan BLT terkendala dengan terbatasnya personil yang kompeten. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting untuk keberhasilan suatu pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan di era teknologi informasi yang terjadi saat ini tidak akan menjadi suatu hal yang berarti jika tidak dibarengi dengan kemajuan dan kesiapan dan sumber daya manusia yang ada. Di era pesatnya kemajuan teknologi seperti saat ini, kemampuan dalam penguasaan teknologi dan komputer menjadi kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki setiap aparatur pemerintahan yang ada. Ketika kita berbicara terkait pengumpulan data dan pengolahan data penerima bantuan langsung tunai ini, penguasaan teknologi dan komputer menjadi kemampuan yang akan mempermudah pekerjaan. Sayangnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada suatu organisasi maupun instansi pemerintah oleh aparatur masih banyak yang belum menguasai teknologi dan komputer secara baik. Pada Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sendiri hampir semua pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan pasti ada bersinggungan dengan teknologi dan komputer. Namun pada kenyataannya di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru masih kekurangan orang yang memiliki keahlian dalam bidang ini. Sehingga dalam proses pendataan menggunakan komputer harus ditanggung dengan jumlah sumber daya manusia yang tak seimbang dengan beban kerja serta rentang waktu yang diberikan pada beberapa kegiatan.

3. Disposisi

Agustino (2006:162) Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa “sikap penerima atau penolakan pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan publik”. Sikap pelaksana dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi oleh sikap disiplin. Hal ini perlu dilakukan guna memberikan pengaruh terhadap keberhasilan implementasi sebuah program. Setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sikap kecenderungan para pelaksana memiliki dua elemen yang perlu diperhatikan karena berhubungan dengan kinerja dalam proses implementasi yaitu kognisi atau pemahaman dan tanggapan dari pelaksanaan kebijakan. Stakeholder adalah pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam suatu organisasi. Stakeholder juga digunakan sebagai perwakilan yang

mendefinisikan tentang komunitas maupun organisasi yang memperoleh dampak secara permanen dari suatu kegiatan maupun kebijakan yang dikeluarkan, dimana mereka berkepentingan atas asil dari suatu kegiatan maupun kebijakan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa komitmen dan kesepakatan stakeholder akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan. Adanya komitmen dan kesepakatan yang baik antar pemangku kepentingan ini tentu akan memberikan dampak yang baik juga atas kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan. Dalam hal ini untuk pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai ini juga merupakan salah satu bentuk dari hasil komitmen dan kesepakatan dari para stakeholder yang ada di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru.

4. Struktural Birokrasi

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32) “struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan .Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.” Implementasi kebijakan akan mudah diimplementasikan apabila sebelum dan sementara implementasi ditunjang dengan struktur birokrasi yang menunjang implementasi. Hubungan kerja dan pembagian tugas dalam struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu kebijakan. Struktur birokrasi merupakan mekanisme kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Standar Operational Prosedur (SOP) dan tanggung jawab pelaksana diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Prosedur yang dikeluarkan menjadi pengatur pekerjaan antara pejabat pelaksana kebijakan supaya implementasi kebijakan berjalan sesuai harapan. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial sebagai pelaksana Program BLT di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru merupakan bagian unsur penting dalam melaksanakan program BLT ini yang kemudian bersinergi bersama unsur-unsur masyarakat.

3.2. Upaya yang perlu dilakukan agar Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepat sasaran.

Upaya yang perlu dilakukan agar Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepat sasaran ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para Pelaksana penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan tata cara pengambilan dan syarat yang harus dilengkapi terkait program bantuan langsung tunai ini adalah langkah awal yang ditempuh pemerintah dalam mencapai tujuan pemberian bantuan berupa uang yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- b. Melakukan edukasi di setiap pertemuan agar para penerima tidak salah paham terhadap dana bantuan langsung tunai dan ingat akan sasaran dalam penggunaan dana bantuan langsung tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- c. Memberikan sanksi yang tegas kepada penerima yang malas datang dalam

pertemuan calon penerima bantuan langsung tunai yang diadakan di kelurahan setiap 3 bulan melalui musyawarah.

- d. Mendampingi para penerima bantuan langsung tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang kurang paham saat proses pencairan dana di kantor pos serta memudahkan proses pencairan dana tersebut.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian.

pelaksanaan pemberian bantuan sosial tersebut masih terdapat permasalahan, seperti adanya warga yang tidak menerima BST/BLT, hal ini disebabkan karena data yang kurang akurat dan tidak sesuai sasaran dalam penyaluran bantuan dikarenakan data yang tidak diperbaharui. pelaksanaan pemberian bantuan sosial tersebut masih terdapat permasalahan, seperti adanya warga yang tidak menerima BST/BLT, hal ini disebabkan karena data yang kurang akurat dan tidak sesuai sasaran dalam penyaluran bantuan dikarenakan data yang tidak diperbaharui. pelaksanaan pemberian bantuan sosial tersebut masih terdapat permasalahan, seperti adanya warga yang tidak menerima BST/BLT, hal ini disebabkan karena data yang kurang akurat dan tidak sesuai sasaran dalam penyaluran bantuan dikarenakan data yang tidak diperbaharui.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian secara keseluruhan yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau masih banyak yang tidak tepat sasaran hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antar pihak terkait yang akan menimbulkan informasi yang kurang jelas tersampaikan kepada masyarakat, hal ini akan menyebabkan masyarakat kurang memahami mengenai program Bantuan Langsung Tunai. Selanjutnya banyaknya bantuan berupa uang maupun barang yang dikeluarkan pemerintah menyebabkan adanya tumpang tindih program bantuan yang diberikan pemerintah sehingga hal tersebut sering menyebabkan data yang tidak sesuai dengan berbagai faktor yang ada di lapangan yang menyebabkan seringnya bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Dan sumberdaya manusia yang terbatas dari segi kualitas mengenai bidang teknologi yang dapat menghambat pembaharuan data yang berdampak pada pemberian BLT yang tidak tepat sasaran.
2. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan tata cara pengambilan dan syarat yang harus dilengkapi terkait program bantuan langsung tunai ini adalah langkah awal yang ditempuh pemerintah dalam mencapai tujuan pemberian bantuan berupa uang yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru serta memberikan pelatihan dibidang teknolngi yang berkaitan dengan bantuan langsung tunai guna meningkatkan kualitas ASN yang ada di Kecamatan maupun Dinas supaya lebih kompeten serta meminta penambahan pekerja yang sudah berkompeten dibidang

teknologi guna memperbanyak sumberdaya manusia yang ada.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Tenayam Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untukmelaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, L. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Badan Pusat Statistik Pekanbaru: BPS 2017. Kota Pekanbaru Dalam Angka 2018.
- Badan Pusat Statistik Pekanbaru: BPS 2018. Kota Pekanbaru Dalam Angka 2019.
- Badan Pusat Statistik Pekanbaru: BPS 2019. Kota Pekanbaru Dalam Angka 2020.
- Edward III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. Congressional Quarterly Press
- Langkai, J. E. 2020. *Kebijakan Publik*. Malang: CV.Seribu Bintang
- Moleong, L. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Noor, J. 2016. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII

Widianto, B. 2008. Perkembangan Perekonomian, subsidi BBM, dan Evaluasi Program BLT. Surabaya: Makalah disampaikan pada Rapat PPLS08

Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media

Winarno, B. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 9 ayat (2)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019

3. JURNAL

Khairiyah, F.,dkk.2020. “Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”. Jurnal Administrasi Publik Vol.15,Surakarta:USM.

4. SUMBER LAIN

<https://infoanggaran.com/> Waduh,Bankeu Kota Pekanbaru Dipotong Rp50 Ribu Untuk Administrasi,Minggu 19 September 2021

